



SATWA DAN MEDIA: KONFLIK GAJAH DI PULAU SUMATERA DALAM SURAT KABAR KOLONIAL (1859-1937)

Jonathan Hasudungan¹, Shafa Nurazizah²

^{1,2}Program Studi Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Padjadjaran

Jonathan22006@mail.unpad.ac.id¹, shafa22005@mail.unpad.ac.id²

Abstrak

Abstrak

Status Gajah Sumatera (*Elephas maximus sumatranus*) yang saat ini berada pada kategori Critically Endangered menunjukkan bahwa konflik antara manusia dan satwa liar telah menjadi persoalan lingkungan yang serius. Berbagai penelitian telah membahas konflik gajah pada masa kontemporer, namun kajian mengenai representasi konflik tersebut dalam media kolonial masih relatif terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk mengkonstruksi narasi dan menganalisis pemberitaan konflik gajah di Sumatera dalam surat kabar kolonial pada tahun 1859-1937. Penelitian menggunakan metode sejarah yang meliputi heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Sumber utama berupa surat kabar kolonial yang diperoleh dari koleksi digital Delpher dan Perpustakaan Universitas Leiden. Analisis dilakukan dengan menggunakan perspektif Marxisme melalui konsep komodifikasi dan teori alienasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekspansi perkebunan komersial di Sumatera pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20 telah mengubah lanskap hutan menjadi lahan produksi monokultur, sehingga mempersempit ruang hidup gajah dan meningkatkan intensitas konflik dengan manusia. Surat kabar kolonial umumnya merepresentasikan gajah sebagai ancaman terhadap kepentingan ekonomi karena dianggap merusak perkebunan, infrastruktur, dan aset perusahaan. Narasi tersebut turut melegitimasi tindakan perburuan sebagai upaya pengendalian gajah. Selain itu, perburuan gajah berkembang menjadi aktivitas bernilai ekonomi melalui perdagangan gading. Analisis konsep komodifikasi menunjukkan bahwa konflik gajah terjadi karena perubahan fungsi ruang hidup menjadi komoditas ekonomi, sedangkan teori alienasi memperlihatkan bahwa para pemburu juga mengalami keterasingan akibat hubungan kerja yang bersifat eksploitatif dalam sistem kapitalis. Dengan demikian, konflik Gajah Sumatera pada masa kolonial merupakan konsekuensi dari transformasi lingkungan dan ekspansi basis kapitalis melalui kolonialisme yang mengubah relasi antara manusia, satwa, dan ruang hidupnya.

Abstract

The current status of the Sumatran elephant (*Elephas maximus sumatranus*) as Critically Endangered indicates that human-wildlife conflict has become a serious environmental issue. Various studies have addressed contemporary elephant conflict, but studies on the representation of this conflict in colonial media are still relatively limited. This study aims to construct a narrative and analyze coverage of elephant conflict in Sumatra within colonial newspapers between 1859-1937. This research uses historical methods including heuristics, criticism, interpretation, and historiography. The primary sources are colonial newspapers obtained from the Delpher digital collection and Leiden University Library. The analysis is conducted using a Marxist perspective through the concept of commodification and alienation theory. The results show that the expansion of commercial plantations in Sumatra in the late 19th to early 20th centuries transformed forest landscapes into monoculture production areas, thereby shrinking elephant living space and increasing the

Article Info

Naskah diterima: 20 Mei 2026,

Naskah direvisi: 1 Juni 2026,

Naskah disetujui: 4 Juni 2026

Keywords

Gajah Sumatera,
Sejarah Lingkungan,
Konflik Gajah,
Surat Kabar

Jonathan Hasudungan, Shafa Nurazizah, Satwa dan Media
intensity of conflict with humans. Colonial newspapers generally represented elephants as a threat to economic interests because they damaged plantations, infrastructure, and company assets. This narrative also legitimized hunting as an effort to control elephants. Furthermore, elephant hunting evolved into an economically valuable activity through the ivory trade. Analysis of the concept of commodification suggests that elephant conflict arises from the transformation of living space into a commodity, while alienation theory suggests that hunters also experience alienation due to exploitative labor relations within the capitalist system. Thus, the Sumatran elephant conflict during the colonial period was a consequence of environmental transformation and expanding capitalist base through colonialism, which altered the relationship between humans, animals, and their living space.

© 2026 Publikasi Pendidikan Sejarah Uniflor

PENDAHULUAN

Status Gajah Sumatera (*Elephas Maximus ssp. Sumatranus*) tercatat dalam beberapa data yang menunjukkan adanya risiko kepunahan terhadap eksistensi spesies endemik Pulau Sumatera tersebut. *International Union for Conservation of Nature* (IUCN) pada tahun 2011 telah mengategorikan Gajah Sumatera dalam tingkat *Critically Endangered* berdasarkan kriteria A2c, artinya terdapat risiko ekstrim terjadinya kepunahan di alam bebas, dengan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia yang memperkirakan adanya 924-1350 ekor Gajah Sumatera tersisa (Gopala dkk., 2011). Dalam beberapa kasus yang dicatat oleh WWF Indonesia sejak tahun 2012, ditemukan bahwa kematian gajah disebabkan oleh racun ataupun jerat di lokasi seperti kawasan hutan hingga bekas hutan yang telah berubah menjadi area perkebunan, terutama perkebunan kelapa sawit (Hanif, 2021). Kemudian, pada tahun 2020 Gajah Sumatera juga menghadapi hilangnya kawasan habitat melebihi 69% dalam kurun waktu 25 tahun (WCS Indonesia, 2020). Kematian Gajah Sumatera dan konflik area konservasi gajah di Tesso Nilo pada tahun 2025 merupakan salah satu kasus terbaru yang menjadi bagian dari konflik satwa ini (CNN Indonesia, 2025).

Munculnya konflik satwa yang menyangkut permasalahan Gajah Sumatera serta data-data krusial mengenai risiko eksistensinya mengundang berbagai pemberitaan dalam media nasional Indonesia. Misalnya, media konservasi alam Mongabay Indonesia menuliskan dalam artikel terbitan 8 September 2020 mengenai seekor gajah di Pusat Latihan Gajah Way Kambas bernama Erin yang sempat terluka akibat jeratan pemburu liar, kondisi

ini dinarasikan sebagai suatu kondisi yang “menyedihkan” (Susanto, 2020). Selanjutnya, DetikNews juga menuliskan mengenai perburuan gajah sebagai suatu bentuk kerakusan manusia untuk memburu dan meracuni satwa yang dilindungi, diperparah oleh ekspansi area pertambangan sehingga habitat Gajah Sumatera semakin berkurang (detikNews, 2020). Kedua pemberitaan tersebut memberikan suatu gambaran mengenai narasi yang membela hak-hak eksistensial satwa liar dalam konteks perkembangan media nasional Indonesia abad ke-21.

Konflik antara Gajah Sumatera dengan manusia di abad ke-21 merefleksikan suatu perebutan ruang hidup yang didasari oleh adanya konflik antara kebutuhan ekonomi manusia terhadap eksistensi satwa liar (Kuswanda dkk., 2022). Persoalan ini kemudian berpotensi untuk diselidiki dengan pendekatan historis yang dapat melengkapi khazanah pengetahuan lingkungan mengenai konflik satwa, sembari menelaah sikap media kolonial dalam memberitakan isu itu. Peter Boomgard mengungkapkan masih kurangnya riset sejarah lingkungan secara umum tentang berbagai wilayah di dunia, terlebih menyangkut wilayah Asia Tenggara hingga pembahasan tentang topik perburuan satwa secara khusus, sehingga tema ini menjadi suatu bidang kajian yang relatif baru (2007). Dalam riset lainnya mengenai konservasi alam di Hindia-Belanda, Boomgard menyajikan sejumlah data mengenai aktivitas perburuan yang dilakukan di Jawa, Sumatera, dan pulau-pulau Nusantara lainnya dari abad ke-17 hingga abad ke-20, baik oleh bangsawan lokal ataupun orang Eropa (1999). Hanya saja, data yang disajikan Boomgard cenderung menunjukkan kepopuleran perburuan rusa,

sedangkan isu perburuan gajah belum mendapatkan atensi signifikan. Penelitian mengenai perburuan gajah dan kaitannya dengan perkembangan perkebunan Sumatera secara lebih komprehensif dilakukan oleh Suriani (2024), tetapi analisis terhadap pemberitaan konflik gajah dalam surat kabar kolonial tidak menjadi fokus utama.

Keterbatasan penelitian mengenai konflik Gajah Sumatera di masa kolonial dan sikap media kolonial mengenai isu tersebut menunjukkan adanya celah yang dapat diulik lebih lanjut, terlebih dengan menarik hubungannya terhadap ekspansi kepentingan ekonomi di wilayah-wilayah terkait. Keseriusan permasalahan ini bisa terlihat dari banyaknya media kolonial, khususnya surat kabar yang memberitakan konflik Gajah Sumatera di awal abad ke-20. contohnya surat kabar *Het Nieuws van den Dag voor Nederlandsch-Indië* yang memberitakan adanya perburuan gajah di Lampung (1907). Selain surat kabar, fenomena konflik gajah pada masa kolonial juga dapat dilacak melalui buku ataupun jurnal pribadi yang ditulis orang Eropa, misalnya *De Olifanten van Sumatra* (1929) dan *Eerste registratie van de kudden olifanten, die voorkomen op Sumatra's Oostkust, -Westkust en Tapanoeli en van gegevens, die daarop betrekking hebben* (1937) yang ditulis oleh Frans Cornelis van Heurn, kedua tulisan itu menyediakan informasi mengenai konflik gajah berupa perburuan dan rusaknya area perkebunan. Beberapa tulisan tersebut menjadi sejumlah sumber historis yang memperlihatkan fenomena konflik gajah serta kaitannya dengan ekspansi perkebunan sebagai suatu masalah lingkungan yang telah berlangsung sejak masa kolonial. Kemudian literatur berjudul *Schets van het Eiland Sumatra* (1867) yang ditulis oleh Veth membahas gambaran umum Pulau Sumatera pada pertengahan abad ke-19 yang mencakup kondisi geografis, topografi, iklim, sungai, pegunungan, serta wilayah pesisir dan pedalaman. Dalam pembahasannya, Veth turut menyoroti kekayaan fauna Sumatra, termasuk gajah, dengan menjelaskan persebaran, praktik perburuan, pemanfaatan gading sebagai komoditas perdagangan, serta nilai ekonominya dalam jaringan perdagangan regional dan internasional, sehingga literatur ini menjadi salah satu sumber penting untuk memahami hubungan antara satwa liar dan aktivitas ekonomi kolonial di Sumatra pada abad ke-19.

Muncul urgensi untuk melakukan penelitian terkait konflik gajah sebagai fenomena lingkungan yang persisten, khususnya dengan maksud memahami pola dan pokok dari persoalan tersebut seperti yang tersurat dalam surat kabar kolonial. Berdasarkan pertimbangan terhadap berbagai penelitian yang telah dilakukan mengenai konflik gajah di Pulau Sumatera serta kehadiran isu itu dalam sejumlah sumber kolonial, maka penelitian ini berupaya untuk mengisi celah terkait khazanah historiografi lingkungan secara umum dan konflik Gajah Sumatera secara khusus. Penelitian ini ditujukan untuk menjawab bagaimana surat kabar kolonial memberitakan konflik gajah di Sumatera pada 1859-1937. Selanjutnya, sejumlah pertanyaan lain yang melengkapi penelitian ini adalah: Bagaimana keadaan lanskap alam Pulau Sumatera pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20? Surat kabar kolonial apa saja yang memberitakan konflik Gajah Sumatera? Mengapa konflik Gajah Sumatera dalam surat kabar kolonial bisa terjadi? Untuk membatasi cakupan penelitian ini maka tiga wilayah administratif kolonial Pulau Sumatera menjadi fokus spasial penelitian dengan penyesuaian terhadap ketersediaan data, yaitu Keresidenan Distrik Lampung, Gubernemen Aceh dan Dependensi, dan Keresidenan Sumatra Timur. Sedangkan fokus temporal penelitian yakni rentang tahun 1859 hingga 1937 juga disesuaikan dengan ketersediaan sumber yang menyediakan data terkait konflik gajah di Pulau Sumatera. Melalui deskripsi yang diperoleh dari sumber-sumber masa kolonial tertulis, khususnya surat kabar, suatu eksplanasi mengenai pemberitaan konflik gajah di Pulau Sumatera dalam surat kabar kolonial dapat diuraikan secara komprehensif. Kemudian penelitian ini akan menguji narasi konflik gajah dengan mengaplikasikan pendekatan Marxis yang berguna untuk mengekspos berbagai permasalahan sosio-ekonomi dalam masyarakat kapitalis.

METODE

Untuk memperoleh uraian mengenai persoalan konflik Gajah Sumatera dalam surat kabar kolonial, penelitian ini menggunakan metode sejarah yang terdiri dari empat tahapan, yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi (Arifin, 2013). Data-data otentik dikumpulkan dalam proses heuristik dari ketersediaan sejumlah sumber primer berbentuk

Jonathan Hasudungan, Shafa Nurazizah, Satwa dan Media surat kabar di situs koleksi digital *Delpher* yang dikelola oleh Perpustakaan Nasional Belanda serta koleksi digital milik Perpustakaan Universitas Leiden. Kemudian data-data historis tersebut diolah untuk membentuk suatu narasi yang logis dan terstruktur. Selanjutnya analisis terhadap narasi yang telah dikonstruksi menggunakan perspektif Marxisme, khususnya konsep komodifikasi dan teori alienasi. Secara sederhana, konsep komodifikasi adalah transformasi suatu objek dengan nilai guna (*use-value*) menjadi suatu komoditas yang ditentukan nilai tukar (*exchange-value*), sehingga penerapan konsep ini dapat menjelaskan posisi lingkungan, khususnya lahan, dalam konflik antara Gajah Sumatera dan manusia (Marx, 1887). Penerapan teori alienasi berfungsi untuk menjelaskan hubungan antara pemburu dengan pekerjaan yang mereka lakukan, khususnya untuk mengekspos sifat eksploitatif dari bidang pekerjaan ini dalam masyarakat kapitalis (Marx, 1932). Pendekatan Marxis secara umum dipilih untuk menghasilkan suatu hasil analisis terhadap akar permasalahan konflik gajah di Pulau Sumatera serta dampaknya dalam dimensi sosio-ekonomi secara materialis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Transformasi Lanskap Alam Pulau Sumatera

Di bawah kekuasaan kolonialisme Hindia-Belanda, Pulau Sumatera mengalami suatu perubahan bentang alam yang signifikan pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 (Itawan, 2020). Di rentang waktu tersebut, pengaruh kolonialisme Hindia-Belanda di Pulau Sumatera mengalami konsolidasi yang signifikan dibandingkan periode sebelumnya, sehingga perkembangan ini memungkinkan terbukanya sumber daya Pulau Sumatera untuk diakses dan digunakan bagi berbagai kepentingan kolonial dengan lebih mudah dan aman, bahkan hingga menjangkau daerah-daerah pedalaman (Dick dkk., 2002). Kondisi seperti itu mengundang para pemegang kepentingan kolonial, khususnya pebisnis-pebisnis dan para pemegang modal, untuk mengembangkan dan menginvestasikan berbagai sektor usaha yang dapat memenuhi sasaran ekonomi mereka dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia di Pulau Sumatera, dalam konteks ini tercatat bahwa bahkan ada investasi modal sebesar f 550.000.000 di

Sumatera Timur sendiri yang mendorong operasional berbagai sektor usaha (Volker, 1929). Maka, terdapat berbagai variasi sektor usaha yang berkembang dan pembangunan infrastrukturnya, seperti perkebunan, pertambangan, industri perminyakan, hingga industri perkeretaapian, sehingga kemunculan sektor-sektor ini menjadi awal peralihan lanskap alam Sumatera yang berkaitan dengan konflik Gajah Sumatera dan manusia.

Perkebunan merupakan salah satu sektor yang berperan besar dalam proses perubahan lanskap alam Pulau Sumatera. Terdapat berbagai variasi tanaman yang dikembangkan dalam perkebunan-perkebunan untuk kepentingan komersial, seperti tembakau, kelapa sawit, karet, kina, dll. Pada tahun 1924, tercatat bahwa 431.672 *bouw* atau sekitar 302.000 hektar lahan di berbagai wilayah Pulau Sumatera dialihfungsikan menjadi perkebunan-perkebunan baru untuk meningkatkan produksi tanaman komersial. Berdasarkan sumber yang sama, Sumatera Timur merupakan daerah dengan pembukaan perkebunan paling masif, dengan total pembukaan lahan sebesar 327.156 *bouw* atau 232.280 hektar (Blink, 1926). Dari berbagai jenis tanaman yang dibudidayakan, perkebunan kelapa sawit menjadi salah satu jenis tanaman yang berekspansi sangat cepat, bahkan mengalami peningkatan total luas pembukaan lahan baru antara tahun 1922 dan 1924 di Sumatera Timur, Lampung, dan Aceh (lihat tabel 1). Berdasarkan data sekunder, antara tahun 1916 hingga 1938 perkebunan kelapa sawit mengalami ekspansi seluas 91.000 hektar (A. dkk., 2017). Salah satu kegiatan ekspansi perkebunan kelapa sawit tercatat dalam surat kabar *Bataviaasch nieuwsblaad* yang memberitakan pembukaan lahan sebesar 1000 hektar oleh Rubber Cultuur Maatschappij Amsterdam di perkebunan Hengelo dan Poeloeradja, Sumatera Timur (1935). Deskripsi mengenai perkebunan kelapa sawit di Pulau Sumatera tersebut menunjukkan adanya perubahan lanskap alam yang signifikan dari hutan purba menjadi lahan kultivasi monokultur, terlebih dengan mempertimbangkan proses introduksi kelapa sawit di Hindia-Belanda yang relatif baru dilakukan pertama kali pada pertengahan abad ke-19 di Buitenzorg dan awal penanaman komersial di Sumatera Timur pada 1911 (Luytjes, 1927; Suriani, 2024).

Tabel 1. Luas Perkebunan Kelapa Sawit Terbaru Di Tahun 1922 dan 1924

Wilayah	1922	1924
Sumatera Timur	3931 <i>bouw</i>	26360 <i>bouw</i>
Aceh	2316 <i>bouw</i>	4792 <i>bouw</i>
Lampung	195 <i>bouw</i>	1107 <i>bouw</i>

Sumber: *Opkomst en ontwikkeling van Sumatra als economisch-geographisch gebied*. 1926.

Selain ekspansi perkebunan, lanskap alam Pulau Sumatera juga menghadapi pembangunan infrastruktur perminyakan. Industri perminyakan mulai berkembang sejak tahun 1883 ketika konsesi-konsesi pertama diberikan di Langkat, selanjutnya wilayah Aceh dan Sumatera Timur merupakan pusat produksi bagi industri ini (Blink, 1926). Sumber yang sama menyediakan suatu data terkait *output* produksi minyak yang dihasilkan Sumatera Timur dan Aceh (lihat tabel 2). Berkembangnya sektor ini merupakan hasil dari berbagai penelitian dan pemetaan geologis di Pulau Sumatera yang lantas menghasilkan suatu industri perminyakan kapitalis dengan perusahaan seperti Bataafsche Petroleum Maatschappij (Harnawan, 2023).

Tabel 2. Total Produksi Minyak Sumatera Timur dan Aceh

Jenis Minyak	1923	1924
Kerosin	62.190.000 liter	45.737.000 liter
Benzena	185.930.000 liter	134.565.000 liter
Residu	19.238.000 liter	6.542.000 liter

Sumber: *Opkomst en ontwikkeling van Sumatra als economisch-geographisch gebied*. 1926.

2. Lingkungan Sebagai Properti dalam Konflik Gajah dan Manusia

Permasalahan konflik gajah dan manusia di Pulau Sumatera dalam surat kabar kolonial dapat dilacak melalui sejumlah terbitan yang bisa diakses. Berdasarkan data-data yang tersedia, beberapa kasus konflik ini berkaitan dengan perkembangan sektor perkebunan dan ladang yang begitu masif di Pulau Sumatera. Salah satu data paling awal mengenai keterkaitan ini ada dalam surat kabar *De Sumatra Post* yang menyebutkan bahwa suatu “wabah gajah”

terjadi di Padang dan Bedage, Sumatera Timur. Seusai kejadian tersebut diketahui bahwa sekitar 3.000 batang pohon kelapa sawit dan 15.000 batang pohon karet mengalami kerusakan sehingga harus dihapuskan dari pembukuan. Sebagai konklusi berita, surat kabar tersebut memberikan pertanyaan retorik mengenai adanya alasan yang baik untuk berburu bagi para pecinta perburuan gajah (1914). Narasi yang sama mengenai gajah juga terulang di Lampung pada tahun 1929, tepatnya di sekitar Menggala, ketika pemilik dari kebun binatang di Bandung yaitu E.W.P Vogelpoel memutuskan untuk ikut berburu dan membantu suatu perkebunan menghadapi “wabah gajah” yang menyerang. Seusai perjalanan itu, Vogelpoel membawa seekor anak gajah yang induknya ia tembak untuk dipelihara dan dipertontonkan di kebun binatang Bandung (“NEDERLANDSCH-INDIE. Op Olifantenjacht,” 1929). Di Aceh, keseriusan persoalan ini bahkan menyebabkan dipanggilnya polisi untuk menangani serangan gajah yang menyebabkan hancurnya 2.000 batang pohon kelapa sawit di suatu perkebunan baru (“Olifanten-plaag,” 1931). Tetapi pemanggilan polisi tersebut tidak selalu berhasil, contohnya serangan gajah di Sumatera Timur yang menyebabkan kerusakan perkebunan kelapa sawit berakhir dengan kegagalan pengusiran oleh kepolisian, sehingga suatu kompi infanteri militer harus dipanggil (“Infanterie op Olifantenjacht,” 1930). Dalam maraknya konflik gajah yang terjadi dan menyebabkan kerusakan terhadap perkebunan atau bahaya terhadap penduduk, residen Lampung justru memberikan izin untuk melakukan perburuan secara bebas terhadap gajah yang dianggap berpotensi merusak tanpa diperlukannya persetujuan khusus dari pemerintah, sehingga keputusan ini menjelaskan posisi dan keterlibatan negara dalam konflik gajah secara hukum (“De Olifantenjacht,” 1937).

Selain perkebunan, konflik gajah dan manusia juga tercatat meninggalkan risiko kerusakan terhadap beberapa infrastruktur bangunan, terutama infrastruktur perminyakan dan komunikasi. Suatu operasi perburuan dilakukan oleh beberapa brigade gendarméri terhadap gajah-gajah yang “destruktif” di sekitar wilayah Seulimeun dan Padang Tidji, Aceh. Operasi tersebut berakhir dengan ditembaknya enam ekor gajah dan diperkirakan berhasil mengamankan jaringan kabel telepon yang menghubungkan dua wilayah tersebut (“Atjeh-Nieuws,” 1900). Hasil yang

Jonathan Hasudungan, Shafa Nurazizah, Satwa dan Media sama tidak terjadi dalam konflik gajah di Pangkalan Brandan ketika seorang polisi lapangan (*veldpolitie*) tewas ketika ia dan rekan-rekannya hendak mengusir segerombolan gajah dari area Pantai Buaya. Gerombolan gajah yang disebut surat kabar sebagai “pembuat onar” tersebut menghancurkan suatu pipa minyak milik Bataafsche Petroleum Maatschappij (“*Veldpolitie* Gedood,” 1934). Peristiwa ini menjadi pemberitaan di beberapa surat kabar lainnya, termasuk *De Sumatra Post* yang mengkritisi perlengkapan senjata yang tidak ideal untuk menembak gajah (1934). Gerombolan gajah tersebut akhirnya mundur dan diperkirakan kembali memasuki hutan purba di Aceh, tetapi terdapat kewaspadaan mengenai potensi kembalinya gerombolan gajah itu sehingga kepolisian setempat mulai memperbarui persenjataan mereka (“UIT DEN OMTREK,” 1934; “VELDPOLITIE TEGEN OLIFANTEN. Betere bewapening,” 1934).

Narasi media kolonial turut berperan dalam membentuk pandangan bahwa gajah merupakan objek yang sah untuk dieksploitasi. Melalui pemberitaan yang menggiring melalui istilah “wabah gajah” ataupun “pembuat onar”, gajah direpresentasikan bukan sebagai satwa liar yang memiliki fungsi ekologis, melainkan sebagai subjek perusak kepentingan. Melalui penerapan konsep komodifikasi dalam analisis terhadap kasus-kasus konflik gajah, dapat diargumentasikan bahwa transformasi lingkungan di Pulau Sumatera tidak hanya membahas perubahan fisik, tetapi juga makna terkait ruang hidup. Dalam hal ini, lahan yang sebelumnya merupakan hutan purba dan berstatus sebagai ruang komunal mempunyai suatu nilai guna terhadap lingkungan di sekitar dengan berbagai fungsi ekologisnya, termasuk bagi masyarakat lokal dan satwa endemik yang ada. Tetapi melalui suatu proses komodifikasi yang didorong oleh kolonialisme dan kapitalisme, lahan tersebut berubah dari ruang komunal menjadi properti swasta dalam bentuk perkebunan, ladang, ataupun infrastruktur perminyakan dengan nilai tukar. Melalui nilai tukar tersebut, fungsi lahan juga berubah menjadi suatu komoditas pasar yang dapat diperjualbelikan dan harus dipertahankan nilai tukarnya dari pengaruh luar yang dianggap destruktif. Di lain sisi, eksistensi gajah sebagai satwa tidak mampu memahami transformasi semacam ini, sehingga dalam konteks

perkembangan masyarakat kapitalis suatu konflik antara spesies gajah dengan manusia terjadi.

3. Berburu Sebagai Pekerjaan Eksploitatif

Pada suatu risalah tercatat gambaran suasana ketakutan petani pada waktu mendekati musim panen. “Orang Agong” (orang besar) merupakan suatu istilah ketakutan untuk kawanan gajah yang merusak ladang masyarakat. Sebagian besar dari mereka yang putus asa melihat sawahnya dirusak atau karena tergiur nilai gading yang mahal, berani menangkap atau membunuh musuh yang begitu ditakuti itu (Van Hoëvell, 1859). Sekelompok pembunuh gajah yang memiliki motif mencari keuntungan tersebut, kemudian terhimpun dalam suatu profesi mata pencaharian yang dikenal dengan “pemburu”. Terdapat banyak data yang memberikan sejumlah petunjuk atau deskripsi mengenai kehidupan sebagai pemburu yang dihadapi di akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20.

Surat kabar *Delftsche Courant* menyediakan suatu informasi mengenai praktik penjualan gading gajah yang biasa dilakukan oleh pemburu pribumi di Aceh (1932). Lalu pada sekitar tahun 1910, seorang perwira berpangkat kapten yaitu H. de Graaf melakukan patroli dan perburuan di wilayah Tanah Gayo. Ia dan rekan-rekannya berhasil membunuh seekor gajah yang kemudian gadingnya dijual seharga f 150 dan lalu dibagikan sebesar f 4 per orang (“*Nederlandsch-Indië. Een Olifantenjacht in Atjeh*,” 1935; “*OLIFANTENJACHT IN DE GAJOLANDEN*,” 1935). Praktik ini menunjukkan bahwa perburuan di masa kolonial merupakan suatu kegiatan yang dapat bersifat komersial dan bisa membantu keuangan seorang pemburu, terlebih dalam masyarakat bersistem ekonomi pasar.

Terlepas dari sejumlah keuntungan ekonomi yang bisa diperoleh, aktivitas perburuan juga memiliki resiko dan tantangan yang tinggi. Kondisi tersebut mendorong para pemburu untuk menggunakan metode alternatif yang dianggap lebih minim risiko, salah satunya melalui upaya peracunan. Cara ini dilakukan dengan meletakkan tebu yang telah dicampur racun tikus di sepanjang jalur yang biasa dilalui gajah. Ketika mulai merasakan efek racun tersebut, gajah umumnya akan mencari perlindungan di kawasan hutan yang terpencil (Veth, 1867). Surat kabar *Semarangsch advertentie-blad* menyebutkan perburuan sebagai kegiatan yang

melelahkan, dan pendapat itu juga didukung oleh kasus yang diberitakan mengenai seorang pemburu Eropa di Lampung yang terluka setelah senapannya meledak ketika ditembak (1896). Insiden lain yang tercatat mengenai perburuan gajah adalah ketika seorang tentara tersandung dan secara tidak sengaja menembak temannya hingga tewas dan menyebabkan dirinya dibawa ke pengadilan militer ("Door eigen vuur," 1918).

Selain potensi bahaya dari satwa atau lingkungan, perburuan-perburuan juga terkenal sering menyebabkan konflik sosial antar sesama pemburu. Dalam kegiatan perburuan yang berjalan, sangat rentan terjadi perdebatan yang bahkan dapat mengundang perkelahian dan kekerasan fisik. Dalam kondisi disiplin yang rendah bahkan dapat ditemukan penggunaan opium di kalangan para pemburu (Otto, 1903). Berdasarkan teori alienasi yang dikembangkan Karl Marx untuk mengekspos relasi antara manusia dan pekerjaannya sebagai seorang pemburu, maka terdapat empat karakter alienasi yang kemudian menghasilkan keterasingan (*estrangement*) dalam pemburu, khususnya yang merupakan masyarakat lokal (1932).

1. Alienasi pekerja dari produknya : Pemburu sebagai seorang pekerja yang hidup dalam masyarakat kapitalis cenderung perlu menjual hasil buruannya dibandingkan memiliki hasil kerjanya sendiri sebagai suatu nilai guna.

2. Alienasi pekerja dari pekerjaannya : Pemburu tidak lagi melakukan aktivitas perburuan untuk menunjang kebutuhannya sendiri secara subsisten, tetapi justru bekerja untuk menjaga batasan-batasan dari bekas ruang hidup gajah yang telah menjadi properti swasta.

3. Alienasi pekerja dari kodrat manusia: Pemburu kehilangan kebebasan dalam menentukan keputusan-keputusannya demi memenuhi kepentingan eksternal, hal ini membuatnya mengalami proses dehumanisasi yang mengharuskan dirinya bertindak dengan membunuh hewan lain.

4. Alienasi pekerja dari orang lain: Pemburu mengalami isolasi karena hubungan yang bersifat antagonis dengan kapitalis yang mengontrolnya. Hal ini juga menyebabkan kerenggangan hubungan sosial yang dapat ia jalin dengan orang lain karena adanya kepentingan pasar.

Dengan demikian, bentuk analisis ini juga menyediakan suatu perspektif yang menyediakan

eksplanasi mengenai pekerjaan sebagai pemburu. Seorang pemburu lantas mengalami keterasingan secara sosial dan eksploitasi kerja karena alienasi yang ia alami sebagai seorang pekerja dalam masyarakat berbasis kapitalis.

SIMPULAN

Pengaruh kolonialisme di Hindia Belanda mendorong perubahan lanskap pada alam Sumatera dalam rentang akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Salah satu contohnya adalah ekspansi hutan purba menjadi lahan kultivasi monokultur untuk perkebunan komersial seperti kelapa sawit, kina, tembakau, karet, dll. Masifnya pembukaan lahan berakibat pada konflik manusia dan satwa, yaitu bahwa satwa yang masuk dan merusak perkebunan atau infrastruktur buatan dianggap menghalangi kepentingan manusia. Pada masa ini media hadir sebagai perantara yang mencatat berbagai kasus konflik satwa dan manusia, salah satunya ialah beberapa catatan media mengenai konflik gajah dan manusia di Sumatera pada tahun 1859-1937. Narasi yang ada dalam surat kabar kolonial sering menghadirkan dan menggambarkan gajah sebagai pengganggu atau pembuat onar. Frekuensi konflik gajah yang sering terjadi bahkan berakibat pada dilibatkannya kepolisian, diturunkannya kompi infanteri militer dan pembentukan operasi perburuan gajah oleh beberapa brigade gendarmeri, serta pemberian izin untuk berburu secara bebas sebagai bentuk campur tangan negara. Konsep komodifikasi yang dirumuskan Karl Marx kemudian mengekspos transformasi lingkungan di Sumatera yang tidak hanya mengubah kondisi fisik hutan, tetapi juga mengubah makna ruang hidup yang sebelumnya berfungsi sebagai wilayah komunal bagi manusia dan satwa, termasuk Gajah Sumatera, menjadi ruang dengan batasan kepemilikan eksklusif. Pada masa kolonial, perburuan gajah berkembang menjadi aktivitas yang bernilai ekonomi, terlihat dari praktik penjualan gading yang memberikan keuntungan finansial bagi para pemburu. Namun kegiatan tersebut juga memiliki risiko tinggi, seperti kecelakaan berburu yang menyebabkan luka-luka hingga kematian. Selain bahaya dari lingkungan dan metode pekerjaan, perburuan kerap memicu konflik sosial antar pemburu akibat persaingan dan rendahnya disiplin dalam aktivitas perburuan. Berdasarkan teori alienasi Karl Marx, pemburu

Jonathan Hasudungan, Shafa Nurazizah, Satwa dan Media mengalami keterasingan dari empat karakteristik yaitu hasil kerjanya, proses kerjanya, kodrat kemanusiaannya, dan hubungan sosialnya dengan orang lain. Kondisi ini menunjukkan bahwa dalam sistem kapitalis, pemburu tidak hanya berperan sebagai pelaku eksploitasi alam, tetapi juga menjadi pihak yang turut mengalami eksploitasi dan keterasingan sosial.

REFERENSI

- A., B., P-M, B., C., B., & P., L. (2017). *Review of the diversity of palm oil production systems in Indonesia: Case study of two provinces: Riau and Jambi*. Center for International Forestry Research (CIFOR).
<https://doi.org/10.17528/cifor/006462>
- Arifin, F. (2013). *Metode Sejarah: Merencanakan dan Menulis Penelitian Sejarah*. Deepublish.
- Atjeh-Nieuws. (1900, Juni 6). *De locomotief : Samarangsche handels- en advertentie-blad*, 1.
- Blink, H. (1926). *OPKOMST EN ONTWIKKELING VAN SUMATRA ALS ECONOMISCH GEOGRAPHISCH GEBIED*. s-Gravenhage : Mouton & Co.
- Boomgaard, P. (1999). Oriental Nature, its Friends and its Enemies: Conservation of Nature in Late-Colonial Indonesia, 1889-1949. *Environment and History*, 5(3), 257–292.
<https://doi.org/10.3197/096734099779568245>
- Boomgaard, P. (2007). *Southeast Asia : An Environmental History*. ABC-CLIO.
- CNN Indonesia. (2025, November 27). *Konflik di TN Tesso Nilo dan Seruan Selamatkan Rumah Gajah Sumatera*.
- De Olifantenjacht. (1937, September 23). *Soerabaijasch handelsblad*, 1.
- detikNews. (2020, Juni 15). *Diburu-Diracun, 700 Gajah Sumatera Mati Dalam 10 Tahun*.
- Dick, H., Houben, V. J. H., Lindblad, J. T., & Wie, T. K. (2002). *The Emergence of a National Economy : An Economic History of Indonesia, 1800-2000*. Asian Studies Association of Australia in association with Allen & Unwin ; University of Hawai'i Press.
- Door eigen vuur. (1918, Maret 22). *De Sumatra Post*, 10.
- Een olifantenplaag. (1914, Oktober 27). *De Sumatra post*, 8.
- Gopala, A., Hadian, O., Sunarto, Sitompul, A., Williams, A., Leimgruber, P., Chambliss, S. E., & Gunaryadi, D. (2011). *Elephas maximus ssp. sumatranus*. *The IUCN Red List of Threatened Species 2011*: e.T199856A9129626.
- Hanif, F. (2021). UPAYA PERLINDUNGAN SATWA LIAR INDONESIA MELALUI INSTRUMEN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 2(2), 29–48.
<https://doi.org/10.38011/jhli.v2i2.24>
- Harnawan, T. (2023). Geological Science and the Making of Colonial Oil Frontiers on the East Coast of Sumatra, 1890-1930. *Lembaran Sejarah*, 19(2), 101.
<https://doi.org/10.22146/lembaran-sejarah.89152>
- Heurn, F. C. van. (1929). *De olifanten van Sumatra*. Gerretsen.
- Heurn, F. C. van. (1937). *Eerste registratie van de kudden olifanten, die voorkomen op Sumatra's Oostkust, -Westkust en Tapanoeli en van gegevens, die daarop betrekking hebben*. De Spiegel.
- Indië in ons midden. (Van onzen eigen correspondent). *De olifant van Atjeh*. (1932, Juli 26). *Delftsche courant*.
- Infanterie op Olifantenjacht. (1930, Mei 28). *Bataviaasch nieuwsblad*, 2.
- Ingezonden. DE OLIFANTEN TE PAN TAI BOEAJA. (1934, Agustus 24). *De Sumatra Post*, 2.
- Itawan, D. (2020). Dari Hutan Purba Menjadi Perkebunan: Fotografi, Propaganda Kemakmuran, dan Perubahan Lanskap di

SAJARATUN: Jurnal Sejarah dan Pembelajaran Sejarah
e-ISSN: 2809-8293 | <https://doi.org/10.37478/sajaratun.v9i2>
Sumatera Timur, 1860an-1930an. *Sejarah*, 3(2),
28–48.

Kuswanda, W., Garsetiasih, R., Gunawan, H.,
Situmorang, R. O. P., Hutapea, F. J., Kwatrina,
R. T., Karlina, E., Atmoko, T., Zahrah, M.,
Takandjandji, M., & Gunaryadi, D. (2022). Can
Humans and Elephants Coexist? A Review of
the Conflict on Sumatra Island, Indonesia.
Diversity, 14(6).
<https://doi.org/10.3390/d14060420>

Luytjes, A. (1927). *De stand van de oliepalmcultuur
op de Oostkust van Sumatra en Atjeh : rapport
naar aanleiding van een onderzoek in de maand
September 1926*. Landsdrukkerij.

Marx, K. (1887). *Capital*. Progress Publishers.

Marx, K. (1932). *Economic and Philosophic
Manuscripts of 1844*. Progress Publishers.

Nederlandsch-Indië. Een Olifantenjacht in Atjeh.
(1935, Agustus 27). *Soerabaijasch handelsblad*,
9.

NEDERLANDSCH-INDIE. Op Olifantenjacht.
(1929, Juni 26). *De Tijd : godsdienstig-
staatkundig dagblad*, 10.

NEDERLANDSCH-INDIE. (1907, Juli 11). *Het nieuws
van den dag voor Nederlandsch-Indië*, 1.

OLIFANTENJACHT IN DE GAJOLANDEN. (1935,
Agustus 20). *Deli courant*, 2.

Olifanten-plaag. (1931, Juli 9). *Bataviaasch
nieuwsblad*, 1.

Otto, E. (1903). *Pflanzer- und Jägerleben auf Sumatra*.
Wilhelm Süsserott.

Sluiting der Mails te Soerabaia. (1896, Agustus 13).
Samarangsche advertentie-blad, 1.

Suriani, S. (2024). PEMANFAATAN DAN
PERBURUAN GAJAH DI PERKEBUNAN
SUMATRA TIMUR PADA AWAL ABAD XX
ELEPHANT UTILIZATION AND HUNTING
IN EAST SUMATRA PLANTATIONS IN THE
EARLY XX CENTURY. *Patrawidya*, 24(1), 83–
102.

Susanto, A. (2020, September 8). *Status Dilindungi
Tidak Menjamin Perburuan Gajah Sumatera
Berhenti*.

UIT DEN OMTREK. (1934, Agustus 29). *Deli
Courant*, 12.

Uitbreiding oliepalm-aanplant. (1935, Maret 6).
Bataviaasch nieuwsblad.

Van Hoëvell, W. R. (1859). De Olifanten op Sumatra.
Tijdschrift voor Nederlandsch-Indië, 291–294.

VELDPOLITIE TEGEN OLIFANTEN. Betere
bewapening. (1934, September 8). *De Indische
courant*, 6.

Veldpolitieman Gedood. (1934, Agustus 24). *Het
nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië*, 3.

Veth, P. J. (1867). *Schets van het eiland Sumatra*. P.N.
Van Kampen.

Volker, T. (1929). *Van oerbosch tot cultuurgebied :
een schets van de beteekenis van de tabak, de
andere cultures en de industrie ter oostkust van
Sumatra*. De Bussy.

WCS Indonesia. (2020, Agustus 28). *TENTANG
GAJAH SUMATERA*.